ABSTRAK

Meri Nurleni: Judul: Implementasi Kebijakan Larangan Pengemis Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Tujuan dalam penelitian ini adalah ingin mendiskripsikan dan menganalisis proses Implementasi Kebijakan Larangan pengemis Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, dilihat dari aspek pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Teknis pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi serta didukung dengan alat pedoman observasi, pedoman wawancara dan alat dokumentasi berupa poto copy, arsip-arsip dan kamera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tahap keorganisasian proses implementasi Perda, dimana keterlibatan unsur pelaksanan yang mempunyai kewenangan belum optimal seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dan Dinas Sosial Kota Pontianak dalam menjalankan visi dan misi, SOP dan tupoksi yang menjadi landasan dalam melaksanakan fungsinya, yang berkaitan dengan penertiban umum khususnya larangan kepada pengemis. Tahap interpretasi Perda tersebut belum menunjukkan kemampuan petugas pelaksana dalam memahami Perda tersebut. Hal tersebut terlihat dari pelaksanan Perda kurang dipahami oleh masyarakat, karena kurangnya sosialisasi. Tahap aplikasi Perda dalam kegiatan penanganan pengemis belum terkoordinir secara professional, karena pelaksanaan penanganan pengemis, belum sepenuhnya mengarah kepada kegiatan Preentif, Preventif, Responsif dan Rehabilitasi.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Larangan. Pengemis.

ABSTRACT

Meri Nurleni: Title: The Implementation of the Beggar Prohibition on the Municipal Police of Pontianak City. This study aimed to describe and analyze the process of implementing the beggar prohibition on the Municipal Police of Pontianak City which was seen from the aspects of organization, interpretation, and application. The techniques of data collection were observation, interview, and documentation as well as supported with observation guide tools, interview guidelines, and documentation tools in the form of photocopies, archives, and cameras. The results of this study showed the organizational stage of the process of implementing the Regional Regulation where the involvement of implementing elements that had authority was not optimal specifically the Municipal Police (Satpol PP) and the Social Department of Pontianak City in carrying out the vision and mission, SOPs, as well as Main Task and Functions which were the basis for carrying out their functions which were also related to controlling especially the beggar prohibition. The interpretation stage of the Regional Regulation had not demonstrated the ability to implement officers to understand the Regional Regulation. This could be seen from the lack of understanding of the implementation of the Regional Regulation by the community due to a lack of socialization. The application stage of the Regional Regulation in beggar handling activities had not been coordinated in a professional manner, because the implementation of beggar handling had not fully led to preventive, responsive, and rehabilitative activities.

Keywords: Implementation, Policy, Prohibition, Beggar.

